

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menganut paham demokrasi, dan sebagai salah satu syaratnya adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Pemilu merupakan penyaluran aspirasi yang paling penting ditengah kondisi masyarakat yang sulit menyalurkan aspirasinya. Pemilu juga dapat dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan potensi masyarakat.

Pemilu Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna dari “kedaulatan ditangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

Pemilu juga diartikan sebagai sarana berdemokrasi untuk membuat suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Sebagaimana dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilihan kepala desa atau seringkali disingkat Pilkades adalah suatu pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh warga desa setempat. Seperti pemilu pada umumnya, ketentuan-ketentuan umum mengenai pilkades juga diatur dalam sebuah peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pengertian desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jadi bisa dikatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik secara keturunan atau karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Secara umum desa dipahami sebagai wadah atau tempat tinggal bersama dari sekelompok masyarakat, baik yang bersifat homogen maupun heterogen yang terdiri dari masyarakat yang budaya lokalnya masih sangat kental dan cenderung mempunyai sifat primordial. Desa memiliki wewenang melaksanakan pemerintahannya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan warganya akan jasa sipil dan layanan publik, sehingga diperlukan aparat desa untuk menjalankan pemerintahan di desa.

Kepala desa sebagai pemimpin formal tertinggi di tingkat desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Peran seorang kepala desa

sangat menentukan arah kemajuan desa. Kepala desa merupakan tokoh sentral dimana peran dan fungsinya sangat dibutuhkan untuk menyuarakan segala kepentingan menyangkut kehidupan masyarakat desa sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat dapat terwujud.

Mengingat pentingnya posisi kepala desa ini maka dalam menentukan siapa yang akan memimpin desa membutuhkan kejelian dari masyarakat agar kepala desa yang terpilih dapat mengemban amanah sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Pemilihan kepala desa sebagai mekanisme pergantian pemimpin merupakan salah satu wujud demokrasi di tingkat desa. Pergantian kepala desa juga merupakan syarat bagi keberlangsungan estafet pemerintahan yang mengambil bentuk pemilihan langsung dimana setiap pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon atau kontestan yang dikehendakinya.

Pemilihan kepala desa sebagai salah satu mekanisme pergantian pemimpin merupakan hal penting dalam struktur pemerintahan, untuk itu pelaksanaan proses demokrasi ini harus terselenggara secara baik dan menjadi representasi kebutuhan dan tuntutan publik, bukan sebatas pergantian elit. Kualitas pemilihan kepala desa (pemilihan langsung pada umumnya) sangat bergantung pada beberapa elemen yang terkait dengan pemilihan tersebut, diantaranya penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Pada penyelenggaraan pemilihan langsung, asas-asas atau peraturan yang mendasari pelaksanaan pemilihan harus diperhatikan oleh penyelenggara, para peserta yang menjadi kontestan dalam pemilihan juga harus bisa menaati

aturan dengan baik, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin yang baik jika terpilih kelak, namun aspek penting lainnya juga tidak bisa diabaikan yakni pemilih. Selain kedua unsur tersebut, kualitas hasil proses demokrasi ini juga sangat bergantung pada kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihan.

Pada suatu pemilihan umum (pemilu), para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta menyampaikan visi misi yang tertuang kedalam program-programnya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan jalannya pemilu terutama dalam memaksimalkan hak pilih mereka untuk menentukan calon pilihannya. Oleh karena itu tuntutan yang sangat besar bagi rakyat untuk dapat memilih calon pilihannya sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing karena mereka telah mengetahui seluk beluk calon yang akan mereka pilih sangat menentukan jalannya pemilu yang berkualitas.

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum terutama bagi para pemilih pemula merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah akan memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Disinilah kita melihat betapa perlunya mensosialisasikan kesadaran politik bagi pemilih pemula kedalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan.

Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap 17 tahun dan atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. Pemilih pemula menjadi perhatian yang cukup serius karena pemilih ini belum berpengalaman dan masih membutuhkan arahan sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk menangani hal-hal semacam ini. Pemilih pemula pada umumnya termasuk kedalam pelajar atau masyarakat yang masih remaja.

Siswa atau remaja pada umumnya memiliki sistem sosial yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka mempunyai dunia sendiri. Kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan remaja antara lain yang mempunyai nilai-nilai, norma-norma, sikap serta bahasa tersendiri yang berbeda dengan bahasa orang dewasa. Oleh karena itu remaja pada umumnya mempunyai persamaan dalam pola tingkah laku, sikap dan nilai. Dimana pola tingkah laku kolektif ini dapat berbeda dalam beberapa hal dengan orang dewasa.

Nilai kebudayaan remaja antara lain adalah santai, bebas dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan. Oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan dihindari. Di samping mencari kesenangan kelompok atau *peer group* adalah penting bagi kehidupan seorang remaja mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Masa pubertas merupakan tahap permulaan perkembangan perasaan sosial. Pada masa ini timbul keinginan remaja untuk mempunyai teman akrab dan bersikap bersatu

dengan teman-temannya, sedangkan dengan orang dewasa mereka menjauhkan diri. *Peer culture* ini sangat berpengaruh sekali pada masa remaja sehingga nilai-nilai kelompok sebaya mempengaruhi mereka. Seorang remaja membutuhkan dukungan dan konsensus dari teman kelompok sebayanya. Setiap penyimpangan nilai dan norma kelompok dalam hal ini akan mendapatkan celaan dari kelompoknya, karena hubungan antara kelompok dan remajanya bersifat solider dan setia kawan. Umumnya para remaja dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan pada minat, kesenangan dan faktor lain. (<http://terasmakalah.blogspot.com>) diakses 09/04/2012/14.37.

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa masyarakat desa merupakan komunitas besar dan dapat menjadi basis suara dalam pemilihan umum. Kajian perilaku pemilih yang dilakukan banyak ahli menggambarkan berbagai macam orientasi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Mengacu pada orientasi *policy-problem solver* dan orientasi ideologi, Firmanzah (2008 : 119) membagi pemilih ke dalam beberapa segmen atau tipe yaitu :

1. Pemilih rasional pada dasarnya menjadikan orientasi kandidat atau partai sebagai penentu dalam memutuskan pilihannya, dimana kemampuan dan program kerja yang ditawarkan, serta prestasi yang telah dicapai oleh kandidat atau partai yang diutamakan.
2. Pemilih kritis juga berorientasi pada kemampuan kandidat atau calon dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, namun masih mempertimbangkan ikatan ideologis yang menjadikannya loyal terhadap partai atau kandidat tertentu.
3. Pemilih tradisional yang menentukan pilihan berdasarkan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, agama, dan biasanya mengutamakan figur atau ketokohan, kepribadian dan nilai historis kandidat atau partai.

4. Pemilih skeptis yakni pemilih yang memiliki minat rendah terhadap politik secara umum atau mereka yang termasuk golongan putih (golput).

Penelitian ini mengambil fokus kajian perilaku pemilih pemula dalam pemilihan *peratin pekon*. Berdasarkan ketentuan umum Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pemilihan dan Penetapan *Peratin*, disebutkan bahwa *pekon* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara *peratin* adalah sebutan untuk kepala *pekon* (kepala desa pada umumnya).

Klasifikasi pemilih secara umum seperti yang dijelaskan sebelumnya juga dapat ditemui pada pemilih dalam pemilihan *peratin pekon*. Idealnya karakter pemilih adalah pemilih rasional, namun kajian perilaku pemilih menunjukkan banyak aspek yang dapat mempengaruhi perilaku memilih diantaranya faktor keluarga, faktor tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat modernisasi yang diterima masyarakatnya sehingga fenomena yang ada menunjukkan tidak semua pemilih rasional.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih pasti belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan pilihannya. Sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk didekati dengan pendekatan materi. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis membuat pemilih pemula sering tidak berpikir secara rasional dan lebih mementingkan

kepentingan jangka pendek. Selain itu afiliasi politik orangtua turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pilihan para pemilih pemula. Apabila orangtua mereka mendukung salah satu calon, maka besar kemungkinan si anak akan ikut pada pilihan orangtua mereka.

Penelitian Afan Gaffar menjelaskan dalam Nursal (2004 : 88) bahwa para pemilih muda khususnya para pemilih pemula mempunyai perilaku yang khas. Seperti misalnya, melihat adanya tendensi para pemuda untuk mengikuti arahan dan nasihat para pemimpin. Di satu sisi, dapat diduga kaum muda memiliki kecenderungan melawan dan memberontak. Berdasarkan penjelasan Afan Gaffar maka dapat diartikan bahwa pemilih pemula masih tergolong labil dalam menentukan pilihannya dan masih dipengaruhi oleh faktor lain baik internal maupun eksternal.

Berbicara mengenai partisipasi dalam pemilu, masyarakat di pedesaan sangat besar kemungkinannya untuk melakukan partisipasi yang dimobilisasi dan bukan otonom. Oleh karena itu rasionalitas pemilih pedesaan dinilai masih rendah dalam memutuskan pilihannya. Seperti dalam hal ini yakni pemilih pemula dalam pemilihan *Peratin Pekon* Rawas yang kebanyakan diduga menentukan pilihannya tidak dengan rasional.

Pemilihan *Peratin Pekon* Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat berlangsung pada tanggal 23 Februari 2012. Berdasarkan data yang ada dari 1.688 jiwa jumlah penduduk terdapat 1.161 yang terdaftar sebagai mata pilih yang dihimpun dari seluruh dusun *pekon* tersebut. Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah pemilih pemula karena baru akan

menggunakan hak pilihnya, dari 1.161 mata pilih terdapat sebanyak 103 orang pemilih pemula. Pemilihan *peratin pekon* Rawas yang berlangsung tersebut hanya terdapat dua orang kandidat calon *peratin* yang bersaing yakni Edy Siskendi, S.Sos dan Nasib Mulyadi. Jumlah perolehan suara masing-masing kandidat berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 06 April 2012 dengan *peratin* terpilih *Pekon* Rawas, yakni Bapak Nasib Mulyadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-masing Calon *Peratin* pada Pemilihan *Peratin Pekon* Rawas Tahun 2012

No.	Nama	Jumlah Suara	%
1.	Edy Siskendi, S.Sos	303	26.10%
2.	Nasib Mulyadi	414	35.66%
Total suara sah		717	61.76%

Sumber : Pra riset (wawancara dengan *peratin* terpilih *Pekon* Rawas)

Berdasarkan tabel perolehan suara yang ada diatas, dalam pemilihan *Peratin Pekon* Rawas yang berlangsung pada tanggal 23 Februari 2012, terdapat total suara sah sejumlah 717 suara dari 900 suara yang terpakai, itu artinya terdapat sebanyak 183 suara tidak sah dalam perhitungan suara.

Perolehan suara yang dihasilkan dari pemilihan *peratin* tersebut tentu tidak lepas dari keikutsertaan pemilih, termasuk dalam hal ini adalah pemilih pemula. Akan tetapi dalam memutuskan pilihannya tentu setiap pemilih mempunyai pandangan dan alasan yang berbeda satu sama lainnya.

Hasil wawancara dengan pemilih pemula saat pra-riset pada tanggal 06 April 2012 di *Pekon* Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat menunjukkan adanya orientasi yang beraneka ragam dalam memutuskan

pilihan, Siti Rohayah (19 tahun), menyatakan bahwa ia memilih Edy Siskendi, S. Sos., dengan alasan ingin pemimpin yang lebih mampu dan memiliki pengetahuan yang lebih luas dimana dari segi pendidikan, calon memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari calon *peratin* yang lainnya. Sedangkan menurut Rizki (18 tahun) alasannya memilih Nasib Mulyadi dikarenakan calon adalah seseorang dengan sosok yang ramah dan sangat bermasyarakat, serta calon masih mempunyai hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa alasan yang variatif dari para informan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pilihannya pada pemilihan *peratin Pekon Rawas* Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012. Kemudian dari serangkaian aspek yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menjatuhkan pilihan ini diklasifikasikan tiga pendekatan perilaku pemilih yakni sosiologis, psikologis dan rasional.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk menggali informasi mengenai perilaku pemilih pemula pada pemilihan *Peratin Pekon Rawas* dengan melakukan penelitian yang berjudul “*Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Peratin Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka dapat dikemukakan perumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana perilaku pemilih pemula dalam Pemilihan *Peratin Pekon* Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pemilih pemula pada pemilihan *Peratin Pekon* Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu politik khususnya yang berkaitan dengan kajian perilaku pemilih para pemilih pemula pada pemilihan umum.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan input bagi masyarakat khususnya di *Pekon Rawas*. Terutama bagi calon *peratin* berikutnya untuk bisa memperhatikan pemilih khususnya pemilih pemula yang masih membutuhkan arahan yaitu dengan cara pengoptimalan dalam sosialisasi program-program unggulan calon *peratin*.